

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Perubahan evolutif dari pengertian di atas didasarkan atas banyak kekecewaan dan hasil umpan balik dari pelaksanaan pembangunan yang tidak mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan serta kekurangan informasi dalam memahami persoalan-persoalan yang timbul yang sebelumnya tidak dapat diramalkan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Ekaputra, 2009).

Pembangunan secara garis besar adalah suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro, 2000).

Menurut Todaro (2000), Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu :

- 1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*)
- 2) Meningkatkan rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya (Arsyad, 2010).

Dalam proses pembangunan ekonomi, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi antardaerah adalah berbeda, sehingga mengakibatkan ketimpangan regional tidak dapat dihindari mengingat adanya perbedaan dalam kekayaan sumber daya yang dimiliki antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dasar pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta konsentrasi kegiatan ekonomi juga berbeda.

Menurut Anwar (1996), teori-teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. *Inward-looking Theories*. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi yang ada di daerah itu sendiri.

2. *Output Oriented Theories*. Teori ini menganggap bahwa adanya mekanisme yang mendasari fenomena pertumbuhan daerah dari satu daerah ke daerah lainnya.

Teori mengenai pembangunan regional dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu :

1. Proses pembangunan wilayah dan ketimpangan antardaerah;
2. Penyebab terjadinya ketimpangan;
3. Alokasi intervensi antardaerah.

Kategori-kategori tersebut bukan suatu pengelompokan yang mutlak tetapi antara yang satu dengan yang lainnya dapat saling melengkapi. Ketimpangan pembangunan antara daerah dengan pusat atau daerah dengan daerah adalah merupakan hal yang wajar. Hal ini disebabkan adanya faktor *endowment* dan awal dari pelaksanaan pembangunan serta investasi. Bagi daerah yang sudah terlebih dahulu membangun tentunya dapat lebih banyak menyediakan sarana dan prasarana, sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi. Proses tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan antardaerah sebenarnya merupakan akibat dari adanya proses pembangunan itu sendiri.

B. Konsep Perwilayahan dalam Pembangunan

Pengertian wilayah yang digunakan dalam perencanaan atau pembangunan dapat berarti suatu wilayah yang sangat sempit atau sangat luas, sepanjang di dalamnya terdapat unsur ruang atau *space*. Untuk kepentingan perencanaan maka wilayah harus dapat dibagi (*partitioning*) atau dikelompokkan (*grouping*) ke dalam satu

kesatuan agar bisa dibedakan dengan kesatuan lain (Tarigan, 2004).

Sjafrizal (2012), menjelaskan bahwa secara umum terdapat empat bentuk wilayah yang banyak digunakan dalam analisis wilayah, yaitu:

1. *Homogeneous Region* yaitu kesatuan wilayah dibentuk dengan memperhatikan kesamaan karakteristik sosial ekonomi dalam wilayah yang bersangkutan.

Termasuk dalam wilayah seperti ini antara lain adalah provinsi, kota, kabupaten, dan desa. Sedang pada tingkat internasional termasuk dalam wilayah ini adalah kesatuan beberapa negara seperti ASEAN (*Association Of Southeast Asian Nations*), *European Union* dan lain lain.

2. *Nodal Region* yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan keterkaitan sosial – ekonomi yang erat antar daerah. Keterkaitan ini menjadi penting karena dapat mendorong terbentuknya kesatuan yang erat antara beberapa daerah atau negara terkait. Termasuk ke dalam wilayah seperti ini antara lain adalah :

JABODETABEK (Kesatuan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) SJORI (Singapur-Johor- Riau) dan segitiga pertumbuhan (*Growth Triagle*) baik IMS- GT (Indonesia – Malaysia – Singapur – *Growth Triagle*) dan IMT-GT (Indonesia – Malaysia – Thailan – *Growth Triangle*).

3. *Planing Region* yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah. Termasuk kedalam wilayah ini antara lain adalah wilayah pembangunan baik pada tingkat nasional maupun provinsi atau kabupaten dan kota sebagaimana umumnya terlihat pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) atau Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

4. *Administrative Region* yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintah. Termasuk ke dalam wilayah ini adalah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Tidak dapat disangkal bahwa adakalanya pengelompokan wilayah administrasi ini sama dengan wilayah homogeneus khususnya dalam penentuan wilayah provinsi atau kota.

C. Pembangunan Wilayah Pesisir

Salah satu ruang lingkup kajian pembangunan wilayah adalah wilayah pesisir dan laut. Wilayah pesisir dalam pengertian ekosistem didefinisikan sebagai suatu zona yang kearah darat dibatasi sampai dimana pengaruh laut masih ada dan kearah laut sampai dimana pengaruh darat masih ada. Secara ekstrim wilayah pesisir dapat dibatasi sampai garis pantai dan unsur-unsur geomorfologis yang berdekatan/berbatasan dengannya, yang ditentukan oleh aksi laut terhadap batas darat (Rais, 2001).

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumberdaya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Secara geografis, wilayah pesisir didefinisikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana proses-proses biologi dan fisika yang kompleks memainkan peranan penting (Dahuri *et al.*, 1996).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Menurut Budiharsono (2001), wilayah pesisir ditinjau dari konsep wilayah termasuk dalam wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administratif dan wilayah perencanaan. Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah sentra produksi ikan, namun biasanya juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduk tergolong di bawah garis kemiskinan.

Sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang dengan wilayah perkotaan sebagai intinya. Bahkan seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman belakang (*back yard*) yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah. Sehubungan dengan fungsinya sebagai wilayah belakang, maka wilayah pesisir merupakan penyedia *input* (pasar *input*) bagi inti dan pasar bagi barang-barang jadi (*output*).

Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir dapat berupa wilayah administrasi yang relatif kecil yaitu kecamatan atau desa, namun dapat pula berupa kabupaten/kota dalam bentuk pulau kecil. Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan oleh kriteria ekologis, sehingga melewati batas-batas wilayah administratif. Terganggunya keseimbangan biofisik-ekologis dalam wilayah ini akan berdampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh daerah tersebut tetapi juga daerah sekitarnya yang merupakan kesatuan wilayah sistem (kawasan). Oleh Karen itu dalam

pembangunan dan pengembangan wilayah ini diperlukan suatu perencanaan terpadu yang tidak menutup kemungkinan adanya lintas batas administratif (Budiharsono, 2001).

Menurut Kusumastanto (2003), bahwa perspektif ekonomi regional, wilayah pesisir dan laut memiliki pilar-pilar penting untuk menjadi kekuatan dalam pembangunan wilayah yang berbasiskan kekuatan ekonomi lokal.

Kekuatan-kekuatan tersebut adalah : 1) *natural resources advantages* dan *imperfect factor mobility*. Artinya di wilayah pesisir terdapat konsentrasi keunggulan wilayah yang tidak dimiliki oleh wilayah lain, seperti sumberdaya alam, kultur dan adanya keterkaitan masyarakat dengan sumberdaya; 2) *economic of concentration* atau *imperfect diversibility*. Artinya secara spasial kegiatan usaha berdasarkan skala ekonomi, umumnya terjadi pengelompokan industri sejenis (*cluster of industry*), jika tidak masuk skala ekonomi, kegiatan ini akan keluar *cluster* yang ada; dan 3) mobilitas adalah pengorbanan. Artinya setiap pergerakan barang dan jasa memerlukan biaya transportasi dan komunikasi. Sehingga kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan laut diarahkan pada upaya untuk meminimalkan jarak dan memaksimalkan akses.

Arsyad (1999) menjelaskan bahwa jika kita membahas perencanaan pembangunan ekonomi daerah maka pengertian wilayah yang paling banyak digunakan adalah sebagai wilayah administratif, karena dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena itu, akan lebih praktis jika suatu Negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan satuan administratif yang ada.

Daerah yang batasannya ditentukan secara administratif lebih mudah dianalisis, Karena biasanya pengumpulan data diberbagai daerah dalam suatu negara, pembagiannya didasarkan pada satuan administratif.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah berasaskan keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan berasaskan keadilan. Adapun tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah: a) melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta system ekologisnya secara berkelanjutan; b) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; c) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan d) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. Antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. Antar pemerintah daerah;
- c. Antar sektor;
- d. Antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;

- e. Antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan
- f. Antara ilmu pengetahuan.

D. Konsep dan Definisi Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli.

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar, 2001).

Strategi berasal dari kata Latin *strategia* yang artinya kantor dari jenderal, selain itu strategi bisa juga diartikan sebagai seni memperlalat atau memperkerjakan tindakan-tindakan yang berasal dari kata Perancis *strategos*, arti lain dari kata strategi adalah *strategems* atau menuju ke arah sebuah tujuan (Soesilo, 2002).

Strategi adalah sekumpulan cara-cara untuk mencapai tujuan, dan strategi adalah suatu pendekatan logis yang akan menentukan arah sebuah aksi (Sitinjak, 2000).

1. Perencanaan strategis

Perencanaan strategis pada dasarnya tidak menganut satu proses yang standar dan banyak sekali variasi proses yang ditawarkan oleh pustaka-pustaka tentang perencanaan strategis (serta tergantung juga dengan dengan bidang tempat perencanaan strategis tersebut diaplikasikan). Menurut sejarahnya, perencanaan strategis pertama kali diaplikasikan dibidang militer, kemudian diaplikasikan ke dunia usaha atau perusahaan. Pada masa berikutnya, tipe perencanaan ini juga aplikasikan ke organisasi nirlaba (*non-profit*) (Djunaedi, 2002).

Pemerintah kecamatan termasuk organisasi nirlaba. Seperti halnya dunia usaha, pemerintah Kecamatan pun perlu tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Orientasi dunia usaha lebih menuju ke pencarian keuntungan atau laba, sedangkan pemerintah kecamatan menekankan pada penyediaan layana dengan sejumlah sumber daya yang dimiliki dan dengan motivasi bukan untuk mencari laba. Dunia usaha membuka atau menutup bidang layanannya tergantung pada pasar dan margin keuntungan, sedangkan pemerintah kecamatan tidak boleh menutup suatu bidang layanan yang ditugaskan kepadanya oleh masyarakat (Djunaedi, 2002).

Pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan baik regional, nasional maupun internasional. Sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah di tuntutan untuk dapat bergerak cepat mengikuti perubahan yang terjadi. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan strategis untuk mengikuti perubahan tersebut. Proses perencanaan strategi untuk mengikuti perubahan tersebut. Proses perencanaan strategi dimulai dari visi dan misi organisasi yang menghasilkan isu-isu strategis, kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti sumber daya strategi, kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti sumber daya, strategi yang telah ada termasuk di dalamnya adalah kinerja organisasi selama ini. Kemudian faktor eksternal adalah faktor-faktor perubahan diluar organisasi. Dari evaluasi ini diharapkan dapat dirumuskan berbagai alternatif strategi

dalam rangka melakukan tindakan-tindakan guna mencapai tujuan organisasi (Rahmat, 2009).

2. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Stiglitz (1998) menyatakan bahwa strategi pembangunan lebih ambisius dari pada dokumen perencanaan, karena strategi pembangunan menyiapkan strategi bukan hanya untuk akumulasi modal dan penempatan sumber daya, tapi juga strategi untuk transformasi masyarakat. Strategi pembangunan memiliki peran penting sebagai pemercepat terjadinya transformasi masyarakat yang bisa dilakukan dengan mengidentifikasi area keuntungan komparatif negara. Mengidentifikasi area ini dan mempublikasikannya sebagai barang publik adalah tanggung jawab pemerintah.

Strategi pembangunan perlu memajukan wacana (*vision*) tentang transformasi, akan seperti apa masyarakat kita 20 tahun mendatang. Wacana ini tentu mengandung tujuan-tujuan kuantitatif, seperti mengurangi kemiskinan (sebanyak setengah) dan memperhatikan pendidikan, namun hal tersebut merupakan elemen-elemen atau target dalam proses transformasi, bukan wacana dari transformasi itu sendiri. Strategi pembangunan kadang dilihat sebagai *blueprint*, sebuah peta yang menggambarkan kemana masyarakat akan menuju.

Dalam membuat strategi kebijakan perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya menetapkan prioritas, koordinasi, dan *consensus builders*. Semua masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya, apalagi bagi masyarakat pada negara miskin. Di atas keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat

adalah keterbatasan kemampuan (*capacity*) pemerintah, oleh karena itu, strategi pembangunan perlu menetapkan prioritas. Kunci utama dari prioritas adalah kesadaran akan tahapan: hal apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu sebelum hal yang lain (Stiglitz, 1998).

Menurut Arsyad (1999), strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu :

- 1) Strategi pengembangan fisik/lokalisasi (*locality or physical development strategy*)
- 2) Strategi pengembangan dunia usaha (*business development strategy*)
- 3) Strategi pengembangan sumber daya manusia (*human resource development strategy*)
- 4) Strategi pengembangan masyarakat (*community based development strategy*)

Strategi pengembangan fisik/lokal ini ditujukan untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki basis pesona (*amenity bases*) atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik daerah/kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Sedangkan strategi pengembangan daerah antara lain melalui penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dengan pengaturan dan kebijakan yang memberi kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.

Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia ini antara lain dapat dilakukan dengan pelatihan dengan sistem

costumized training atau pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemberi kerja. Sementara itu strategi pengembangan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu disuatu daerah. Kegiatan tersebut juga sering disebut dengan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau memperoleh keuntungan usahanya (Arsyad, 1999).

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Nofidi H. Ekaputra (2009), Kajian Pengembangan Strategi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Pelalawan dan memberikan rancangan program dalam mengambil kebijakan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal. Metode analisis berupa *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) menggunakan *software Preference Rations in Multiattribute Evaluation* (PRIME). Analisis untuk menentukan sektor mana saja yang merupakan basis dan non basis yang berkembang di Kabupaten Pelalawan, digunakan metode *Location Quotient* (LQ).

Rekomendasi kebijakan dalam mengembangkan wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan dengan konsentrasi strategi adalah menggali potensi perikanan sebagai skenario arahan pembangunan ekonomi, adalah : 1) mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah pesisir; 2) merespon teknologi secara terapan dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan; 3) meningkatkan

fungsi kelembagaan dengan mengupayakan pemberdayaan lembaga keuangan mikro melalui koperasi yang sudah ada; 4) meningkatkan saran dan prasarana perataan tangkap dengan revitalisasi sarana kapal tangkap dan perlengkapan; 5) mengembangkan agribisnis perikanan.

Penelitian Tri Ratna Saridewi (2003), Studi Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir di Kabupaten Subang, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di wilayah pesisir, mengakomodir pandangan berbagai ahli terhadap pengembangan perikanan Kabupaten Subang, mengkaji apakah sektor perikanan laut dan tambak adalah sektor basis, mengkaji usaha (strategi) yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga nelayan.

Strategi pembangunan ekonomi wilayah pesisir di Kabupaten Subang adalah bidang budidaya tambak *silvofisheries*, dengan penerapan teknologi tambak ramah lingkungan, dan sebagai prioritas andalan kedua adalah kegiatan pengembangan teknologi penangkapan di Kabupaten Subang merupakan kurang penting untuk diperhatikan, dan perlu adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia wilayah pesisir, penguatan kelembagaan masyarakat, dan penguatan sarana dan prasarana.

Penelitian Almasdi Syahza (2012), Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir Di Propinsi Riau, dalam penelitian ini menjelaskan model pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Model yang dimaksudkan untuk mencoba menetralsir dikotomi-dikotomi dari pembagian pendapatan yang tidak adil antara masyarakat wilayah pesisir dengan masyarakat wilayah daratan. Metode analisis

yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif terutama terhadap data kualitatif.

Menghasilkan kesimpulan Angka Kemiskinan dan Isu Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) angka kemiskinan relatif tinggi (56,76%); 2) infrastruktur dasar belum memadai (rumah tidak layak huni, jalan, abrasi, air bersih, banjir, pelabuhan, listrik); 3) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, (masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan); 4) fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang relatif masih terbatas; 5) angka kematian ibu dan bayi yang relatif masih tinggi (sarana dan prasarana Kesehatan masih belum memadai); 6) penangkapan ikan masih menggunakan alat tradisional; 7) perkebunan karet milik masyarakat yang sudah tua, sehingga diperlukan proses revitalisasi untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan.

Penelitian Yunizar (2013), Strategi Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Minapolitan Di Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya perikanan di wilayah Anambas dan merumuskan strategi pengembangan wilayah melalui pendekatan minapolitan.

Metode analisis berupa Analisis Deskriptif, *Location Quotient* (LQ), Analisis internal dan eksternal (IFE-EFE) serta analisis Strengths Weaknesses Opportunities Threat (SWOT), dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) diperoleh urutan prioritas strategi yakni: 1) Membangun prasarana dan sarana sektor kelautan dan perikanan; 2) Membuat kajian dan perencanaan sektor kelautan dan perikanan; 3) Memprioritaskan program yang mendukung

minapolitan; 4) Meningkatkan pembinaan dan keterampilan nelayan; 5) Menetapkan Anambas sebagai kawasan minapolitan melalui regulasi pemerintah pusat; dan 6) Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai lembaga.

Penelitian Teti Sri Kusvita (2013), *Evaluasi dan Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Bogor*, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan dan keberlanjutan program pengembangan kawasan minapolitan, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan minapolitan di Kabupaten Bogor, dan merumuskan strategi dan program untuk meningkatkan kinerja program pengembangan minapolitan.

Analisis terhadap faktor eksternal dan internal dalam matrik SWOT melahirkan 7 alternatif strategi dalam pengembangan Kawasan Minapolitan di masa yang akan datang. Selanjutnya prioritas strategi tertinggi pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor ditentukan melalui analisis Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (*Quantitative Strategic Planning Matrix-QSPM*) yang menghasilkan tiga strategi utama yaitu: (1) Pengembangan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Produk, (2) Peningkatan Kapasitas Produksi dan (3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penunjang. Hasil penelitian menghendaki penyusunan program dan kegiatan oleh instansi terkait diarahkan untuk mendukung strategi tersebut.

Penelitian Basuki Rahmat (2009), *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pegunungan dan Pesisir Kabupaten Lampung Barat*, dalam penelitiannya untuk merumuskan strategi dan program pengembangan produk unggulan di

Kabupaten Lampung Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis LQ, metode skalogram, SWOT, dan QSPM.

Hasil analisis skalogram dan LQ serta kondisi wilayah didapat kesimpulan kopi robusta dapat diprioritaskan sebagai produk unggulan wilayah pegunungan dan ikan merupakan produk unggulan untuk wilayah pesisir. Hasil analisis SWOT dan QSPM didapat 9 strategi pengembangan produk unggulan Kabupaten Lampung Barat. Hasil analisis QSPM terdapat dua grand strategi yakni pengembangan kompetensi daerah dan pengembangan kemitraan dengan swasta/lembaga lain.

Penelitian Abdul Wahid (2006), Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat), dalam penelitian ini menjelaskan perumusan strategi dengan mengidentifikasi tingkat ketimpangan potensi fisik wilayah dan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Garut. Metode analisis berupa analisis sistem hirarki potensi fisik wilayah (HFP), sistem hirarki tingkat pemerataan pembangunan, metode skalogram, sistem limpitan sejajar dan strategis, serta analisis matriks IFE, EFE, SWOT, dan QSP.

Menghasilkan kesimpulan Berdasarkan analisis faktor eksternal bahwa dalam pembangunan daerah tertinggal, menunjukkan Kabupaten Garut sedang berusaha untuk memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman (2.547). Hasil analisis faktor internal menunjukkan bahwa Kabupaten Garut belum sepenuhnya mampu untuk mengatasi kelemahan dan menggunakan kekuatan untuk pembangunan daerah tertinggal (2.362). Berdasarkan analisis matriks QSP yang di dapat dari analisis matriks SWOT, maka prioritas alternatif strategi yang terpilih

yaitu : 1) meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan; 2) strategi pembangunan sarana dan prasarana; 3) memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis pedesaan; 4) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara adil dan transparan

Penelitian Rizki Rahajuning Tyas (2006), Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, dalam penelitiannya tentang strategi pembangunan yang terarah disesuaikan dengan potensi wilayah di Kabupaten Situbondo untuk mengidentifikasi penyebaran sarana dan prasarana pembangunan, mengidentifikasi kondisi lingkungan internal dan eksternal pembangunan, serta merumuskan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Situbondo. Metode analisis berupa analisis LQ, analisis skalogram, Matriks IFE, EFE, SWOT, dan QSP.

Menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT diperoleh 12 alternatif strategi yang dirumuskan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil analisis Matriks QSP strategi yang menjadi prioritas utama, adalah strategi meningkatkan potensi SDA dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, strategi meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA serta pengembangan Litbang melalui pemanfaatan teknologi.

Penelitian Siti Nurjanah (2006), Strategi Pembangunan Wilayah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten), dalam penelitiannya ini untuk

merumuskan strategi yang harus disusun oleh *stakeholders* dalam pembangunan wilayah tertinggal Kabupaten Pandeglang. Perumusan strategi ini didukung dengan mengidentifikasi sektor unggulan, hirarki pusat pertumbuhan dan pelayanan serta hirarki potensi sumberdaya wilayah. Metode analisis berupa analisis LQ, metode skalogram, sistem hirarki potensi sumberdaya wilayah sistem limpitan sejajar serta analisis matriks IFE, EFE, SWOT, dan QSPM.

Menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT diperoleh 10 alternatif strategi dalam rangka pembangunan wilayah tertinggal Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil analisis Matriks QSPM, strategi yang menjadi prioritas utama adalah strategi meningkatkan potensi sumberdaya yang dimiliki (SDA, letak geografis dan keadaan biofisik) untuk menarik investor dan kemitraan/kerjasama dari pihak swasta atau pihak lain. Sedangkan strategi yang menempati prioritas akhir adalah strategi pemberdayaan kelembagaan, aparatur dan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemitraan/kerjasama dengan pihak swasta ataupun pihak lain.

Penelitian Asri Dwi Asmarani (2010), Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis SWOT Dan AHP, berfokus pada pemilihan strategi terbaik bagi Kabupaten Klaten dalam melakukan pembangunan daerahnya, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Penelitian ini menggunakan 2 instrumen kuisioner, yaitu kuisioner SWOT dan kuisioner AHP. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro.

Penelitian Almasdi Syahza dan Suarman (2013), Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, dalam penelitian ini bertujuan menemukan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau. Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (*Developmental Research*). Guna mendapatkan informasi secara umum tentang keadaan daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan, penelitian ini banyak memanfaatkan data primer yang didapatkan melalui survei. Data sekunder hanya bersifat sebagai pendukung. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode Rapid Rural Appraisal (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek.

Sasaran yang hendak dicapai adalah memacu pertumbuhan dan percepatan pembangunan di daerah tertinggal dengan sasaran peningkatan taraf hidup masyarakat desa tertinggal. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan tiga aspek utama, yaitu: 1) peningkatan ekonomi rakyat (mengentaskan kemiskinan); 2) peningkatan kualitas sumberdaya manusia (kebodohan); 3) pembangunan infrastruktur.